

## DPRD Bintan Sahkan Perda Perangkat Desa dan Perda Pendidikan



Penyerahan Ranperda RPJMD dan Perangkat Desa, dari Bupati Bintan kepada Ketua DPRD Bintan, Nesar Ahmmad



Sekwan bintang, edi yusri saat membacakan laporannya



Para kepala OPD Bintan yang hadir di acara rapat paripurna di DPRD Bintan

BATAMTODAY.COM, Bintan - Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah akhirnya disahkan menjadi Perda Bintan dalam sidang paripurna yang digelar di Kantor DPRD Bintan, Rabu (21/2/2018) siang.

Sebelum disetujui menjadi perda, Sekretaris Pansus Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, Hesti Gustrian menyampaikan laporan hasil kerja pansus. Pihaknya telah melakukan inventarisir permasalahan pendidikan yang ada di Bintan seperti masalah pendidikan karakter, kurikulum pendidikan, pendanaan pendidikan, pendidikan keagamaan hingga peran serta masyarakat dan juga para orang tua untuk mendo rong anak-anaknya bisa berkesempatan mendapatkan pendidikan.

Seperi terinci dalam Perda, Hesti pun berharap agar penyelenggaraan pendidikan di Bintan ke depannya bisa membaik. Usai menyampaikan laporan hasil kerja pansus berikut catatannya.

"Dengan adanya perda ini, diharapkan ada pemerataan sistem, pemberian beasiswa dan juga guru honor, terpenting adanya kesadaran orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan," ujar Hesti.

Sementara itu, Sekretaris Pansus Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Umar Ali Rangkuti juga berkesempatan menyampaikan laporan hasil kerja pansusnya. Ia menuturkan, dalam perda yang baru direvisi ini terjadi beberapa perubahan dalam perangkat daerah seperti adanya dinas yang dilebur dan digabung hingga penambahan dinas baru di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTS) provinsi dan kabupaten/kota hanya menangan masalah penanaman modal dan tidak bisa digabung dengan urusan lainnya. Sedangkan di Bintan DPMPPTS digabung dengan urusan Ketenagakerjaan sehingga harus dilebur.

Sedangkan untuk melaksanakan komitmen Pemda dengan KPK melalui pengintegrasian program penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik yang berbasis teknologi dan siap menjamin transparansi, efisiensi dan efektivitas bebas KKN melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perlu dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika di Bintan.

"Jadi ada satu dinas baru yang terbentuk, kemudian ada penggabungan dan adapula peleburan dinas. Ini demi asa efisiensi dan efektivitas serta menyesuaikan kebutuhan daerah," tutur Umar.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Bintan yang sudah bekerja dalam mengesahkan ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Bintan kepada DPRD Bintan.

"Kami, pemerintah daerah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD secara kelembagaan yang tertuang dalam pansus atas pembobotan terhadap ranperda yang kami sampaikan hingga disahkan menjadi perda. Mengang permasalahan pendidikan sangat kompleks dan harus ada penyempurnaan," tutur Apri saat menyampaikan pandangan akhirnya terhadap dua perda tersebut. (\*)

Foto : Syajarul Rusydy  
Narasi : Syajarul Rusydy  
Editor : Yudha



Anggota DPRD Bintan, yang hadir di agenda rapat paripurna



Suasana rapat anggota DPRD Bintan



Para kepala OPD yang hadir di acara rapat paripurna



Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda RPJMD dan Ranperda Perangkat Desa, bertempat di gedung DPRD Bintan

Abadikan moment spesial Anda di **BATAMTODAY.COM gallery**

untuk pemesanan hubungi:

Telp : (0778) 7482-514

Email : batamtoday@gmail.com